

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Lahirnya otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan semua urusan pemerintahan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi sehingga mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk lebih memberdayakan semua potensi yang dimiliki dalam rangka membangun dan mengembangkan daerahnya (Halim, 2002). Sebagai konsekuensi dari kewenangan otonomi yang luas, pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat secara demokratis, adil, merata dan berkesinambungan. Kewajiban itu bisa dipenuhi apabila pemerintah daerah mampu mengelola potensi daerahnya yaitu potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan potensi sumber daya keuangannya secara optimal (Halim, 2002).

Jusmawati (2011) menyatakan bahwa pertimbangan mendasar terselenggaranya otonomi daerah adalah perkembangan dari dalam negeri yang mengindikasikan bahwa rakyat menghendaki keterbukaan dan kemandirian. Keterbukaan dan kemandirian yang dimaksud adalah mengenai pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan anggaran daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Pasal 4 tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat

pada peraturan perundang-undangan yang berlaku efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan. Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan dituangkan dalam APBD yang langsung maupun tidak langsung mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan sosial masyarakat.

Menurut Halim (2002: 126), pemerintah daerah yang diserahi tugas menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah pemerintah daerah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. Salah satu alat untuk menilai kinerja pemerintah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya. Rasio yang dapat digunakan dalam menganalisis rasio keuangan terhadap APBD antara lain; rasio kemandirian keuangan daerah, rasio keserasian belanja operasional, dan rasio keserasian belanja modal. Hasil analisis rasio keuangan ini selanjutnya digunakan untuk tolak ukur dalam (Halim, 2002;126):

1. Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah.
2. Mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah.

3. Mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya.
4. Mengukur masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah.
5. Melihat pertumbuhan/ perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

Berdasarkan analisis rasio keuangan pemerintah daerah tersebut terlihat potensi yang diperoleh dari kinerja keuangan daerah. Hal ini disebabkan karena kinerja keuangan pemerintah yang baik akan memicu pemerintah untuk menggali potensi-potensi daerah dan akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan berpengaruh terhadap kemajuan suatu daerah, pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara ekonomis, efisien dan efektif atau memenuhi prinsip *value for money* serta partisipasi, transparansi, akuntabilitas dan keadilan akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi (Sularso, 2011). Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tujuan penting pemerintah daerah maupun pemerintah pusat karena pertumbuhan ekonomi mengindikasikan bahwa suatu daerah tersebut dapat dikatakan maju dan berkembang (Kawa, 2011).

Berdasarkan latar belakang yang diungkapkan di atas, penelitian ini mengambil judul **“PENGARUH KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN**

**EKONOMI DAERAH KABUPATEN/ KOTA SE-EKS
KARESIDENAN MADIUN TAHUN ANGGARAN 2007-2013”.**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah kinerja keuangan pemerintah daerah yang dilihat dari rasio kemandirian keuangan daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi?
2. Apakah kinerja keuangan pemerintah daerah yang dilihat dari rasio keserasian belanja operasional berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi?
3. Apakah kinerja keuangan pemerintah daerah yang dilihat dari rasio keserasian belanja modal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi?
4. Apakah kinerja keuangan pemerintah daerah yang dilihat dari rasio kemandirian daerah, rasio keserasian belanja operasional dan rasio belanja modal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi?

1.3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1.3.1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah kinerja keuangan pemerintah daerah yang dilihat dari rasio kemandirian keuangan daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

2. Untuk mengetahui apakah kinerja keuangan pemerintah daerah yang dilihat dari rasio keserasian belanja operasional berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.
3. Untuk mengetahui apakah kinerja keuangan pemerintah daerah yang dilihat dari rasio keserasian belanja modal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.
4. Untuk mengetahui apakah kinerja keuangan pemerintah daerah yang dilihat dari rasio kemandirian keuangan daerah, rasio keserasian belanja operasional dan rasio keserasian belanja modal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

1.4.2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman peneliti terkait dengan akuntansi sektor publik, khususnya mengenai kinerja keuangan daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah.

2. Bagi Prodi/ Fakultas

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi baru bagi jurusan akuntansi sehingga dapat dimanfaatkan oleh khalayak umum khususnya mahasiswa, dosen dan segenap lingkungan Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

3. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi perencanaan dan pengambilan keputusan pembangunan daerah dalam rangka otonomi daerah dan peningkatan pertumbuhan ekonomi.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi dan bahan pengembangan penelitian, serta dapat digunakan sebagai pembanding.